

# ORIENTASI NILAI FILSAFAT HUKUM KELUARGA : REFLEKSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN\*

Abdul Ghofur Anshori\*\*

## Abstract

*Law Number 1, 1974 on Marriage is a legal norm that binds all Indonesian citizens wherever they are. The emergence of the law ruling marital matters, including the family, cannot be separated from the teleology of its formation. Marriage and the family as ruled by Law Number 1, 1974 has axiological aspect, benefiting citizens and the state, with the role of creating peace and justice for the whole people. The rules in Law Number 1, 1974 are just like traffic-rules in the lives of citizens. The quality of family life and marriage depends a lot on individuals' understanding of the philosophical values of marriage and family life. Family legal values, including marriage-life values will give benefits if the husband and wife always hold on to the philosophical values contained in all aspects of their family and marriage life.*

*Indonesia, as a sovereign country, has its own legal system, including the formation of its marriage and family law. The human ontological nature underlying the meaning of marriage and family life springs from Pancasila philosophical values as found in the preamble of the Indonesian 1945 Constitution, the grundnorm of the Republic of Indonesia. Therefore, we realize the importance of understanding law from its philosophical aspects for everyone : lecturers, students, practitioners, legal apparatus, citizens and State personnel. If the correct understanding is reached, God wills, the ideal of creating an orderly and peaceful state life could be realized.*

**Kata kunci :** filsafat hukum keluarga, nilai, perkawinan

## A. Pendahuluan

Berbicara tentang hukum, perlu kiranya memikirkan secara mendalam supaya maknanya yang luhur menjadi nyata. Apabila orang memiliki suatu pengertian hukum yang tepat, maka akan menaruh hormat terhadapnya dan akan timbullah semangat

membangun suatu negara hukum yang lebih sempurna. Jarak antara hukum dan keadilan tidak jauh, orang yang mengerti makna hukum akan rela untuk taat pada norma yang berlaku dan mereka akan memandangnya sebagai bagian cita-cita hidup.<sup>1</sup>

\* Diedit dari Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 12 Desember 2005.

\*\* Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum dan Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

<sup>1</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 11.



Pada zaman sekarang ini sering terdengar orang mempertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar pernikahan bagi kehidupan modern. Dalam zaman yang ditandai oleh paradigma kenisbian yang hampir tidak terkendali, khususnya paham kenisbian nilai-nilai hidup, pertanyaan tersebut sangat penting untuk kita jawab dengan cara yang jelas. Mempertanyakan sebuah nilai yang telah mapan adalah sebuah kewajaran, dan sekali lagi tentu saja kita harus dapat menjawab pertanyaan tersebut. Disamping jawaban, kita juga seharusnya mencermati mengapa pertanyaan tersebut muncul di masyarakat, apakah arti pernikahan dan keluarga memang betul tidak relevan di kehidupan modern semacam ini?

Pertanyaan semacam itu adalah sebuah sinyalemen telah goyahnya pondasi kehidupan berkeluarga yang dilandasi perkawinan. Keadaan ini bisa jadi sudah mulai menjangkiti masyarakat Indonesia. Seperti yang terjadi di Jepang misalnya, terdapat kecenderungan perubahan sosial bahwa keluarga tidak didefinisikan sebagai kehidupan rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak dan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah atau semenda, namun di Jepang seseorang mencukupkannya dengan dirinya sendiri dan pembantu (pekerja) rumah tangga yang membantu kehidupannya.<sup>2</sup> Demikian pula yang terjadi di berbagai belahan bumi yang menjalani kehidupan keluarga namun tidak didasari atas dasar pernikahan.

Ada dua hal yang harus kita pisahkan dalam menganalisis persoalan semacam ini, yang juga sekaligus untuk menjawab per-

tanyaan di atas, yang pertama adalah makna keluarga dan yang kedua adalah makna pernikahan.

### B. Makna Keluarga

Tuhan mengelola alam raya ini dengan penuh keteraturan, keseimbangan, keserasian, dan perhitungan yang sangat teliti. Hal demikian itu merupakan ciri segala sesuatu dari unit yang terkecil di alam raya ini sampai dengan yang terbesar, sebagaimana difirmankan Tuhan dalam Kitab Suci: "*Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan yang sangat teliti. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan tunduk pada-Nya. Dia meninggalkan langit dan meletakkan neraca perimbangan supaya kamu tidak melampaui batas neraca itu*". (QS. Ar Rahman : 5-8).

Demikian pula dengan keluarga. Keluarga merupakan keteraturan yang sengaja diciptakan Tuhan untuk manusia. Keluarga lahir sebagai konsekuensi dari salah satu kefitrahan manusia. Salah satu unsur fitrah manusia adalah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan Tuhan. Sebagaimana firmanNya: "*Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram terhadapnya (sakinah) dan dijalannya rasa kasih (mawaddah) dan sayang diantaramu (rahmah). Sesungguhnya pada yang demiki-*

*an itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*" (QS. Ar Rum: 21). "*Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*" (QS. An Nahl: 72).

Tuhan menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap manusia dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga. Keluarga adalah "umat kecil" yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Kitab Suci menamakan satu komunitas dengan kata "ummat", demikian pula menamakan ibu yang melahirkan anak keturunan dengan kata "umm". Menurut Quraish Shihab<sup>3</sup>, kedua kata tersebut terambil dari akar kata yang sama. Dalam keluarga sarat dengan makna pembinaan dan pengaturan, sepadan dengan kata ummat (masyarakat) yang bermakna juga sebagai tatanan hubungan antar orang (manusia) yang tertib dan teratur. Keluarga merupakan unit terkecil yang akan membentuk masyarakat. Karakter masyarakat yang terbentuk, tercermin dalam kehidupan keluarga-keluarga dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cermin dari

keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.<sup>4</sup>

Kehidupan keluarga, apabila diibaratkan sebagai satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu, maka ia harus didirikan di atas satu fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang berkualitas serta jalinan perekat yang kokoh. Fondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, bahan bangunan keluarga adalah laki-laki dan perempuan, jalinan perekatnya adalah pernikahan.

### C. Makna Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Hubungan seksual di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang sakral dengan sendirinya, oleh sebab itu pernikahan bukan semata-mata sebagai situs sakramen melainkan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup> Menurut Imam Syafi'i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya

<sup>3</sup> Quraish Shihab, 1994, *Membumikan Al-Quran*, Mizan, Bandung, hlm. 255.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>5</sup> Seyyed Hossein Nasr, 2003, *Islam : Agama, Sejarah dan Peradaban*, Risalah Gusti, Surabaya, hlm. 80.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, 1986, *Monogamy Principles Based on the Act No. 1 of 1974 in Islam Perspective*, PSUI, Jakarta. Harian Sinar Pagi, "Perceraian Tabu di Jepang", Edisi 11 Desember 1984.



menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti majazi (*methaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>6</sup> Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).<sup>7</sup>

Nurcholish Madjid mengartikan *mawaddah* dalam bentuk kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi yang tidak hanya disebabkan semata-mata dari segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak seperti segi kepribadian atau nilai-nilai lainnya yang sejenis pada seseorang, sedangkan *rahmah* adalah jenis kecintaan ilahi, karena bersumber dan berpangkal dari sifat Tuhan yang *Rahman* dan *Rahim*.<sup>8</sup> Dengan demikian sungguh agung konsep keluarga yang digagas oleh Islam.

Oleh karena itu pada tempatnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai *al-khaliq* (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada ke-

manusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan *ijab kabul* dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*).<sup>9</sup> Hak dan kewajiban suami isteri timbal balik diatur amat rapi dan tertib. Demikian pula hak dan kewajiban orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri, diatur juga bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>10</sup> Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>11</sup> Sumiyati menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>12</sup>

Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu (1) memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia, (2) memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan, (3) memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, (4) membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang, dan (5) menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>13</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

#### D. Pengaturan Perkawinan oleh Negara

Satu-satunya undang-undang yang positif berlaku mengatur masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila dicermati lebih dalam, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) hanya bermaksud menata manusia agar tertib-teratur, sehingga jika manusia melaksanakannya maka sesungguhnya ia juga melaksanakan nilai-nilai ideal kemanusiaannya. Disebutkan dalam Pasal 1 UUP bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi ketentuan tersebut, menandakan bahwa perkawinan bukan hanya dipandang sebagai ikatan perdata belaka, tetapi mengandung dimensi transendental. Oleh karena itu, ketentuan ini sangat berbeda dengan apa yang diatur oleh *Burgerlijk Wetboek* (KUH-Perdata) yang menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26 KUHPerdata).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3 UUP bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kitab

<sup>6</sup> Ibrahim Hosen, 1971, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, hlm. 65.

<sup>7</sup> Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 47.

<sup>8</sup> Nurcholish Madjid, 2000, *Masyarakat Religius*, Penerbit Paramadina, Jakarta, hlm. 73.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, 1964, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta, hlm. 1.

<sup>11</sup> Helmy Masdar, 1969, *Islam dan Keluarga Berencana*, CV. Thoha Saputra, Semarang, hlm. 12.

<sup>12</sup> Sumiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta.

<sup>13</sup> M. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 27.



Suci: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..." (QS. An Nisa: 3).

Ayat ini sebetulnya merupakan pembatasan dalam perkawinan pada bentuk perkawinan monogami. Perintah untuk mengawini wanita lebih dari satu, bukan perintah yang bersifat imperatif namun bersifat fakultatif ketika kita tidak mampu berlaku adil kepada perempuan yatim yang kita kawini, karena dalam ayat yang lain (QS. An Nisa: 2) Tuhan melarang kita untuk menukar dan memakan harta anak yatim. Mengawini wanita yang bukan anak yatim pun dibatasi dengan jumlah seorang saja, ketika kita tidak mampu berlaku adil. Keadilan merupakan hal mutlak dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu perintah mengawini seorang saja lebih kuat dari pada lebih dari seorang, walaupun dalam hal ini Islam memberikan peluang kepada seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu dengan syarat yang berat, yaitu mampu berlaku adil.

Seyyed Hossein Nasr menyatakan kebanyakan keluarga yang dibangun di dunia Islam adalah keluarga monogami, dan praktik-praktik poligami merupakan kasus pengecualian yang diperbolehkan daripada ketentuan yang menjadi regulasi yang biasanya merupakan dampak dari faktor-faktor ekonomi dan sosial dan dari keinginan Islam yang kuat untuk melihat seluruh anggota masyarakat dapat diintegrasikan pada ling-

kup hubungan familial. Dengan demikian, peluang ini jangan dijadikan alasan legalitas yang bersifat imperatif terhadap keberlangsungan praktik poligami.<sup>14</sup>

Sejalan dengan ketentuan tersebut, UUP juga membolehkan seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu wanita dengan syarat yang berat pula, yaitu: (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selanjutnya, untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut: (1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ketentuan tersebut sudah ideal bagi sebuah pembatasan, mengingat persyaratan yang diberikan sudah teramat berat. Keluargan untuk melakukan poligami hanya diberikan ketika isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri, cacat fisik/penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau isteri tidak melahirkan keturunan. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka sebab ketiga hal tersebut mungkin bagi sebagian orang sulit dicapai. Oleh karena itu UUP memberikan peluang untuk beristri lebih dari satu.

Dalam Pasal 8 UUP disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang

(1) berhubungan darah dalam garis keturunannya lurus ke bawah ataupun ke atas; (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Kitab Suci: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, bibi-bibimu dari ayah, bibi-bibimu dari ibu, kemenakan-kemenakan perempuanmu dari saudara laki-laki, kemenakan-kemenakan perempuanmu dari saudara perempuanmu, ibu-ibu susu kamu, anak-anak tiri perempuanmu yang telah menjadi tanggunganmu dari isteri yang telah kamu pergauli-sedangkan yang dari istri yang belum kamu pergauli, maka dibolehkan bagimu dan (diharamkan atas kamu) istri anak-anak lelakimu sendiri, dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang" (QS: An Nisa: 23).

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan siapa-siapa yang tidak boleh saling meni-

kahi. Pada dasarnya ketentuan ini adalah ketentuan universal, berkenaan dengan *incest taboo*.<sup>15</sup> atau 'sumbang' dalam istilah KUHPerdata. *Incest* adalah *sexual intercourse between close relatives*, sedangkan *taboo* bermakna *something that is forbidden because of strong religious or social custom*.<sup>16</sup> Dengan demikian *incest taboo* atau sumbang merupakan sesuatu yang harus dihindari karena alasan ketidakpatutan secara sosial dan budaya.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri, Pasal 31 UUP mengaturnya dengan sangat elegan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Berbeda dengan yang diatur oleh *Burgerlijk Wetboek* (KUHPPerdata) bahwa seorang perempuan yang telah kawin pada umumnya juga tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam hukum, tetapi harus dibantu suaminya (Pasal 108 KUHPPerdata). Ia termasuk golongan orang yang oleh hukum dianggap kurang cakap untuk bertindak sendiri.<sup>17</sup> Dengan demikian UUP jauh lebih maju dibandingkan dengan KUHPPerdata. Dengan alasan tersebutlah UUP menghapus ketentuan berlakunya KUHPPerdata, berdasarkan adagium *lex posteriori derogate legi priori*.

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UUP). Suami adalah kepala

<sup>14</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Op.cit.*, hlm. 81.

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, *Op.cit.*, hlm. 79.

<sup>16</sup> Martin H. Manser, 1991, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Second Edition, Oxford University Press.

<sup>17</sup> Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 20.



keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP). Suami diberikan kewajiban oleh undang-undang untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Demikian pula istri yang diwajibkan oleh undang-undang untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UUP).

Tanggung jawab istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, bukan berarti membakukan peran perempuan hanya pada ranah domestik (*domain domestic*), dan laki-laki pada ranah publik (*domain public*). Demikian pula kedudukan suami sebagai kepala keluarga bukan berarti kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Sebagai institusi paling independen, keluarga memang memiliki otoritas absolut dalam mengatur perjalanan roda rumah tangganya. Tidak ada satu pun kekuatan luar sekalipun itu pemerintah-memiliki otoritas penuh untuk melakukan intervensi terhadap satu keluarga, kecuali atas izin keluarga bersangkutan. Oleh karena itu dalam redaksi Pasal 34 ayat (3) UUP hanya menyatakan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan bukan menuntut suami atau isteri ke pengadilan karena diperbolehkan melakukan tindak pidana melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut.

Namun demikian patut disadari kenyataan bahwa Tuhan memang telah memberikan kelebihan kepada laki-laki sebagaimana difirmankan dalam Kitab Suci: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka*

*(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...*" (QS. An Nisa: 34). Pembagian peran tersebut sekali lagi hanya dalam rumah tangga dan bukan meliputi semua sektor. Dengan demikian alasan nyata adalah karena dia berjenis kelamin laki-laki yang perannya dianggap sudah melekat (*inheren*) di dalam jenis kelamin itu sendiri, ia harus bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga.

Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya merupakan kewajiban suami dan isteri (Pasal 45 UUP). Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hal ini disadari karena keluarga merupakan lembaga pendidikan yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan karakter, kepribadian, etika, moral, dan sopan santun. Keluarga juga menjadi institusi pendidikan nilai-nilai sosial dan religi bagi setiap anggotanya.

Seiring dengan perkembangan jaman, dewasa ini kita melihat pergeseran nilai-nilai tersebut di atas, sejak lembaga pendidikan formal-sekolah dan kampus-tidak mampu lagi membendung arus perubahan negatif terhadap remaja. Penelitian LPKGM-FK UGM membuktikan itu. Penelitian pada 2001 di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, menemukan fakta bahwa keluarga tidak lagi menjadi tempat aman bagi anggotanya. Kenyataan ini dapat kita lihat sehari-hari di televisi melalui tayangan-tayangan kriminal yang mempertontonkan kejahatan seorang

ayah yang menghamili anak kandungnya sendiri, kejahatan seorang kakak yang menghamili adik kandungnya sendiri, kekerasan terhadap isteri dan anak, perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya. Longgarnya proteksi keluarga dan tidak berfungsinya pola pendidikan di keluarga telah membawa petaka seperti pemerkosaan oleh anak di bawah umur, penyimpangan seksual, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan kurang berfungsinya pranata keluarga sebagai wahana pendidikan bagi anggota keluarganya. Penanaman nilai-nilai luhur itu sangat penting bagi kelangsungan kehidupan keluarga, sebagaimana firman Tuhan: "*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*" (QS. At Tahrim: 6).

Demikian pula anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46). Setelah tauhid-paham Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam sistem ajaran Islam yang menyeluruh mungkin tidak ada perkara yang sedemikian pentingnya seperti hubungan antara anak dan orang tua.<sup>18</sup> Penilaian ini disimpulkan dari firman Tuhan dalam Kitab Suci: "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan ke-*

*pada keduanya dengan perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia*" (QS. Al Isra': 23). Bahkan jika orang tua mengajak anak kepada menyekutukan Tuhan, maka anak harus tetap memperlakukan keduanya dengan baik. Sebagaimana firman Tuhan: "*Dan jika keduanya (orang tuamu) itu berusaha mendorongmu agar engkau mempersekutukan Aku (Tuhan) dengan sesuatu yang engkau tidak berpengetahuan mengenainya, maka janganlah kamu taati mereka, namun tetaplah bergaul dengan mereka berdua itu di dunia ini dengan cara yang baik*" (QS. Luqman: 15). Demikian pula terhadap kerabat yang menyimpang pada jalan kebenaran ilahi, kita tetap harus menunjukkan sikap yang hormat dan sopan santun: "*Dan bahkan jika engkau harus berpaling dari mereka demi memperoleh rahmat Tuhanmu yang kau harapkan, bertuturlah dengan mereka dengan penuturan penuh kasih sayang*" (QS. Al Isra': 28).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat nilai-nilai yang agung dan universal, bahkan nilai-nilai tersebut sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Suci. Oleh karena itu seyogyanya kita dapat merefleksikan nilai-nilai tersebut bukan hanya sebagai nilai moral dan etika semata tetapi juga merupakan kewajiban hukum dan agama. Jadi dengan diaturnya perkawinan dengan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, negara telah memainkan perannya untuk mengatur ketertiban masyarakat yang salah satu aspeknya adalah perkawinan.

<sup>18</sup> Nurcholish Madjid, *Op.cit.*, hlm. 81.



## E. Peran Filsafat dalam Hukum Keluarga

Untuk dapat memahami makna dari nilai hidup kekeluargaan sebagaimana undang-undang dan/atau peraturan negara telah mengaturnya, maka setiap orang perlu mengetahui hakikat keluarga dan hakikat perkawinan, yang tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sendiri. Penelaahan makna terdalam demikian, kita tidak dapat melepaskan aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi dari perkawinan dan hidup kekeluargaan yang semuanya bertumpu pada realitas manusia dan kemanusiaan.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di alam ini, berbeda dari makhluk-makhluk lain. Perbedaan itu tampak dari karakteristik sebagaimanaparafilesofmenyebut hakikat manusia dengan istilah-istilah *homo rationale*, *homo symbolicum*, *homo economicus*, *homo social* (Aristoteles), *homo ludens* (Huizinga), *homo mensura* (Protagoras), *homo mechanicus* (La Mettrie), *homo viator* (Gabriel Marcel), *homo creator* (Michael Landman). Profesor Notonagoro (alm) memandang hakikat dasar ontologis manusia dalam Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila sebagai makhluk yang monopluralis. Manusia sebagai makhluk yang monopluralis oleh Profesor Notonagoro (alm) diartikan sebagai makhluk yang memiliki 3 (tiga) hakikat kodrat sebagai berikut: (1) sifat kodrat, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial; (2) susunan kodrat, yaitu manusia sebagai makhluk yang tersusun dari dua unsur, yaitu raga dan jiwa; (3) kedudukan kodrat, yaitu manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Atas dasar pemahaman hakikat kodrat ontologi manusia yang monopluralis itu, maka kita dapat dengan mudah memahami hubungan antara manusia dengan nilai-nilai hidup kekeluargaan dan nilai-nilai sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan dan hidup kekeluargaan dalam rangka kehidupan yang tertib dan teratur sekaligus juga sebagai sarana manusia untuk memenuhi hakikat kodrat ontologisnya itu. Perkawinan, kekeluargaan, serta hakikat kodrat ontologis manusia masing-masing merupakan realitas yang berdiri sendiri namun saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut dalam konsep yang ideal dicita-citakan senantiasa berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan manusia, yaitu (a) secara pribadi individu, ia sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan yang masing-masing perlu memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani; (b) secara sosial, ia hidup dalam masyarakat yang membutuhkan keadaan tertib dan teratur serta aman, dalam hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang senantiasa inklusif didalamnya ada kekuasaan yang dapat dipaksakan yang berupa norma (hukum); dan (c) secara kejadian asalnya manusia itu sendiri yaitu dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan hakikat kodrat ontologi manusia yang monopluralis hasil pemikiran Profesor Notonagoro (alm) itu merupakan pandangan metafisik atas manusia, menunjukkan kedudukan eksistensi manusia. Eksistensi manusia di sini adalah eksistensi manusia di alam semesta, eksistensi manu-

sia terhadap Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Atas dasar pemahaman ontologi manusia yang bersifat monopluralis yang berperan dalam memahami ontologi keluarga dan perkawinan, kemudian akan dapat dilahirkan pula tatanan pengetahuan yang benar terhadap realitas keluarga dan perkawinan. Dengan kata lain, ontologi manusia yang monopluralis berperan dalam menjadi pangkal tolak atau sumber bagi lahirnya tatanan pengetahuan yang benar mengenai makna perkawinan dan makna keluarga. Demikian pula ontologi manusia yang monopluralis berperan dalam membentuk susunan bangunan pengetahuan yang benar mengenai keluarga dalam perkawinan. Aspek epistimologi adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dicapai rasio manusia atas hukum keluarga sebagai obyek pembahasan. Dengan tinjauan epistimologi keluarga dan perkawinan seperti ini maka keberadaan perkawinan dan keberadaan keluarga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia ini.

Aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensial nilai yang terdapat di dalam hukum keluarga. Nilai di sini terutama mengenai baik dan buruk dari aspek moral atau etika, di samping juga mengenai manfaat. Berpangkal dari keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian menimbulkan hubungan kekeluargaan yaitu yang dibedakan atas dasar keturunan darah maupun karena hubungan perkawinan. Demikian pula kemudian timbul hubungan kewarisan, yang menjadi kepentingan negara untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Aspek aksiologi sebagai bagian dari filsafat, dalam hal ini sangat penting sebagaimana landasan ontologi manusia yang monopluralis berimplikasi pada tatanan pengetahuan yang dihasilkannya. Aspek aksiologi dari hukum keluarga juga tidak lepas dari landasan ontologi ini.

Definisi perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUP yang sekaligus mencakup juga arti keluarga, dihubungkan dengan ketentuan absahnya perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUP, memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan landasan filosofis ontologi manusia yang bersifat monopluralis.

Perlu dikemukakan di sini bahwa kita patut berbangga dan menghargai hasil pemikiran dari Profesor Notonagoro (alm) sebagai seorang cendekiawan yang filosof. Beliau telah menghasilkan pemikirannya yang cemerlang dalam menggali butir-butir ilmiah dari Pancasila, dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diuraikan oleh beliau bahwa landasan ontologi manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila untuk menjadi sebuah sistem filsafat. Selanjutnya Pancasila yang menjadi sebuah sistem filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia.

Atas dasar uraian di muka, dapatlah diketahui bahwa aspek-aspek filsafat hukum keluarga Indonesia sesuai dengan uraian filosofis ontologi manusia, yang dalam hal ini manusia Indonesia yang memiliki filsafat Pancasila.

Kodrat manusia itu antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia telah diadopsi oleh Undang-Undang Negara.



Pendefinisian perkawinan oleh undang-undang yang mendasarkan keabsahan perkawinan bila dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia bersesuaian dengan nilai filosofis ontologi manusia monopluralis mengakui pula nilai religius yang bersifat mutlak.

Kerangka normatif hukum positif negara pada dasarnya adalah aturan yang diciptakan atas dasar kepentingan negara mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, damai dan aman sesuai dengan asas bahwa setiap aturan hukum hendaknya dibentuk dengan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam hal hukum keluarga, maka bagaimana dan akan seperti apakah aturan hukum itu dirumuskan, sepenuhnya tergantung kepada kebutuhan dan perkembangan hidup bermasyarakat dan bernegara dan dengan mengacu pada landasan filosofisnya. Landasan filosofis ini penting bagi sesuatu aturan hukum positif, karena aturan hukum positif akan efektif berlaku bila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat tersebut adalah berupa keabsahan secara sosiologis, absah secara yuridis, dan absah secara filosofis.

Aspek-aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari hukum keluarga merupakan upaya pemahaman yang utuh atas hukum keluarga. Pemahaman yang utuh yang dimaksud di sini adalah upaya pemahaman hakikat hukum keluarga yang melampaui pandangan terhadap masalah keluarga atau hukum keluarga hanyalah sebagai sebuah realitas dari hukum atau ilmiah hukum dan senantiasa hanya dilihat dari sifat normatif belaka. Memandang masalah keluarga atau hukum keluarga hanyalah sebagai realitas

belaka dari hukum atau ilmu hukum, sehingga semata-mata memahaminya dari aspek normatif saja akan berakibat terjadinya pembatasan pandangan atau kemampuan ilmiah terhadap fenomena keluarga yang menjadi bagian dalam sistem kehidupan.

Filsafat hukum keluarga sudah seyogyanya sejak saat ini dijadikan suatu pokok kajian atau tema dalam studi hukum. Hal ini didasarkan pada 3 (tiga) hal. *Pertama*, keluarga adalah basis bagi pembentukan kehidupan negara yang sejahtera, aman, tertib dan damai. *Kedua*, filsafat hukum keluarga memberikan kerangka atau landasan bagi pengembangan ilmu hukum yang lebih luas, tidak terbatas pada hukum keluarga saja. Hal ini karena kaitan yang erat antara keluarga dengan aspek-aspek hukum yang lain, baik bersifat teoritis maupun praktis yang bersifat perdata, pidana, administratif serta martabat kemanusiaan universal. *Ketiga*, nilai-nilai filsafat hukum yang terbangun selaras dengan nilai-nilai filsafat Pancasila dengan sendirinya menghapuskan nilai-nilai filosofis lama/ warisan sistem hukum kolonial yang meliputi berbagai aturan hukum yang sampai sekarang masih berlaku karena belum diganti dengan aturan hukum positif yang baru yang bernilai filsafat Pancasila.

Dengan demikian filsafat hukum, dalam hal ini filsafat hukum keluarga akan berperan positif membangun aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat dan negara yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-perundang-undangan selain itu sekaligus juga senantiasa memiliki tugas penting, yaitu untuk mengembangkan sistem hukum nasional serta memberikan pemahaman yang benar akan makna setiap aturan hukum positif.

Dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, masalah-masalah perkawinan dan kehidupan keluarga senantiasa timbul dari waktu ke waktu sejak dahulu kala pada setiap orang. Dalam kehidupan modern sekarang fungsi kekuasaan negara pun dijalankan sebagai realisasi penerapan aturan dan sistem hukum yang berlaku. Aturan dan sistem hukum antara negara-negara khususnya mengenai perkawinan dan kekeluargaan dalam hal ini berbeda-beda, sebagai wujud kedaulatan setiap Negara.

Setelah Belanda dan Belgia, baru-baru ini parlemen Spanyol telah mengesahkan undang-undang perkawinan sesama jenis. Spanyol bahkan melangkah lebih jauh dengan menjadi negara pertama yang memberikan hak adopsi anak kepada pasangan sesama jenis. Pengesahan undang-undang seperti ini di negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Katolik menunjukkan dekadensi moral yang sangat dalam di tengah masyarakat Barat. Tampaknya, saat mengesahkan rancangan undang-undang yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis, aborsi dan kemudahan untuk perceraian, para anggota parlemen Spanyol tidak lagi mempedulikan suara protes yang disampaikan oleh para pemimpin gereja Katolik di Spanyol bahkan Vatikan.<sup>19</sup>

Dalam sejarah perkembangan filsafat dapat dikatakan bahwa selama kurang lebih seribu tahun, Gereja memiliki kekuasaan mutlak di Eropa, sebelum akhirnya kekuasaan ini terbatas dengan munculnya gerakan *Renaissance* pada abad kelima belas

Masehi. Masa kekuasaan Gereja yang biasa disebut sebagai masa kegelapan Eropa telah melahirkan sentimen anti Gereja. Mereka menuduh Gereja telah bersikap selama seribu tahun layaknya polisi yang memeriksa keyakinan setiap orang. Selanjutnya lahirah teori yang menempatkan manusia sebagai segala-galanya menggantikan Tuhan. Berdasarkan teori ini, manusialah yang menjadi tolok ukur kebaikan dan keburukan. Kondisi di masa itu yang dipenuhi dengan kegetiran abad pertengahan, telah membuat teori ini dengan cepat berkembang luas di Eropa. Era baru ini telah melahirkan teori yang mengecam segala sesuatu yang membatasi kebebasan individu manusia. Akibatnya, agama berubah peran dan menjadi sebatas masalah individu yang hanya dimanfaatkan ketika seseorang memerlukan sandaran untuk mengusir kegelisahan batin dan kesendirian. Agama secara perlahan tergeser dari kehidupan masyarakat di Eropa.<sup>20</sup>

Setelah masa *Renaissance*, teori pemisahan agama dari kehidupan politik menjadi acuan utama rezim-rezim di Eropa. Setelah berakhirnya perang dunia II, menyusul terjadinya transformasi politik dan sosial baru, serta berkembangnya industri dan teknologi di Barat, masalah etika lambat laun tersisihkan. Bersamaan dengan itu, berbagai paham materialisme baru bermunculan seperti jamur di musim hujan. Parahnya, sebagian paham baru ini tidak memberikan sedikit pun nilai bagi masalah tata susila. Masyarakat Barat di abad 21 tidak hanya memandang agama sebagai masalah indi-

<sup>19</sup> Harian Republika, 25 April 2005, www.Republika.co.id

<sup>20</sup> Theo Huijbers, *Loc.cit.*



vidual, tetapi juga beranggapan bahwa tidak ada yang bisa membatasi kebebasannya, walaupun kebebasan yang dikejar itu bertentangan dengan naluri kemanusiaannya. Yang menarik perhatian, pemerintah di negara-negara Barat ikut terlibat melunturkan nilai-nilai moral dan penyimpangan susila dengan membuat undang-undang yang membenarkannya.

Orang-orang bijak mengatakan bahwa masa lalu adalah pelita bagi masa depan. Sejarah mencatat bahwa banyak bangsa yang besar dengan peradabannya yang agung hancur di masa keemasannya karena didera krisis moral. Kelangngan sebuah peradaban sangat bergantung pada banyak faktor, di antaranya faktor kemanusiaan dan moral yang sedang dilupakan oleh dunia Barat. Melihat kondisi yang demikian, muncul sebuah pertanyaan, tindakan apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi dekadensi moral di Barat pada abad 21 ini? Para pakar sosiolog dan ahli agama berpendapat bahwa krisis moral di Barat hanya bisa diatasi dengan kembalinya spiritual dan agama ke tengah kehidupan masyarakat di sana.<sup>21</sup>

## F. Penutup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan norma hukum yang berlaku mengikat untuk semua warga Negara Indonesia di mana pun berada. Adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, termasuk mengenai

kekeluargaan, tidak lepas dari teleologis pembentukannya.

Perkawinan dan kekeluargaan sebagai mana materinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki aspek aksiologis, yaitu aspek manfaat baik bagi warga negara maupun bagi negara yang berperan untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan bagi rakyatnya. Aturan-aturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanyalah sebagai sarana mengatur tata tertib lalu lintas dalam kehidupan warga Negara. Baik buruknya hidup kekeluargaan dan perkawinan dari sebuah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan akan sangat ditentukan oleh pemahaman individu yang bersangkutan akan makna filosofis perkawinan dan keluarga. Nilai-nilai hukum keluarga termasuk pula nilai-nilai hidup perkawinan akan memberikan hasil manfaat yang baik ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalani kehidupannya dalam bentuk sebuah keluarga itu senantiasa berpegang pada nilai-nilai filsafat yang terkandung di dalam setiap aspek kehidupan kekeluargaan dan perkawinannya.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki sistem hukum sendiri, termasuk dalam mengatur masalah perkawinan dan keluarga. Hakikat dasar kodrat ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang

<sup>21</sup> Fritjof Capra, 1997, *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, Benteng Budaya, Yogyakarta. Mahbubul Haq, 1983, *Tirai Kemiskinan : Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*, Obor, Jakarta. Abdul Munir Mulkan, 2005, "Ma'rifat Question, Jalan Pembebasan Manusia dari Mekanisme Konflik" dalam *Begawan Muhammadiyah : Bunga Rampai Pidato Pengukuhan Guru Besar Tokoh Muhammadiyah*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta.

Dasar 1945 yang menjadi *grundnorm* Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas kita dapat menangkap betapa pentingnya memahami hukum dari aspek filosofis bagi semua pihak, baik pengajar,

mahasiswa, praktisi, penegak hukum, masyarakat maupun aparat negara. Apabila semua itu dapat dilakukan, *insyaallah* cita-cita hidup bernegara yang tertib dan damai dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, 1986, *Monogamy Principles Based on the Act No. 1 of 1974 in Islam Perspective*, PSUI, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Capra, Fritjof, 1997, *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, Benteng Budaya, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bumi Restu, Jakarta.
- Haq, Mahbubul, 1983, *Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga*, Obor, Jakarta.
- Harian Sinar Pagi, "Perceraian Tabu di Jepang", Edisi 11 Desember 1984.
- Harian Republika, 25 April 2005, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)
- Hazairin, 1976, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tinta Mas, Jakarta.
- Hosen, Ibrahim, 1971, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- , 1985, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Kaelan, 2004, *Paradigma Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Madjid, Nurcholish, 2000, *Masyarakat Religius*, Penerbit Paramadina, Jakarta.
- Manser, Martin H, 1991, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Second Edition, Oxford University Press.
- Masdar, Helmy, 1969, *Islam dan Keluarga Berencana*, CV. Thoha Saputra, Semarang.
- Mulkan, Abdul Munir, 2005, "Ma'rifat Question, Jalan Pembebasan Manusia dari Mekanisme Konflik" dalam *Begawan Muhammadiyah: Bunga Rampai Pidato Pengukuhan Guru Besar Tokoh Muhammadiyah*, PSAP Muhammadiyah, Jakarta.
- Nasr, Seyyed Hossein, 2003, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Ramulyo, M. Idris, 2004, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Aditya, Bandung.
- Shihab, Quraish, 1994, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung.
- Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.



- , 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sumiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*, Liberty, Yogyakarta.
- Thalib, Sajuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yunus, Mahmud, 1964, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta.